

**INOVASI KEBIJAKAN PENATAAN LINGKUNGAN DAN
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS
(Studi Pada Masalah Sampah Di Kelurahan Bumi Waras
Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ANISA RIZKI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

INOVASI KEBIJAKAN PENATAAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (Studi Pada Masalah Sampah di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)

Oleh

ANISA RIZKI

Persoalan sampah di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung merupakan masalah yang serius, sehingga harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Seiring dengan bertambahnya penduduk, maka volume sampah yang dihasilkan terus meningkat. Sampah dapat menjadi potensi apabila cara pengelolaannya dilakukan dengan baik. Saat ini timbulan sampah di Bumi Waras mencapai 166,13 m³ sedangkan, daya angkut sampah di Bumi Waras hanya 41,57%. Sehingga, sampah yang tidak terangkut tersebut banyak yang berakhir di pesisir pantai Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alternatif kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam mengelola sampah di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini alternatif kebijakannya pengelolaan sampah melalui program bank sampah, penyebaran programnya melalui sosialisasi yang dilakukan pada bulan september hingga sekarang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberdayakan masyarakat di lokasi tersebut agar dapat mengubah sampah yang tidak berharga menjadi barang yang mempunyai potensi dan nilai jual.

Kata Kunci: Inovasi, Pengelolaan Sampah, PLPBK

ABSTRACT

INNOVATION OF POLICY ENVIRONMENTAL ARRANGEMENT AND SETTLEMENT COMMUNITY BASED (Study on Waste Problems in Bumi Waras Village)

By

ANISA RIZKI

The issue of waste in the Bumi Waras Village, Bandar Lampung City is a serious problem, so it must be resolved immediately so as not to have a negative impact. As the population increases, the volume of waste produced continues to increase. Waste can be a potential to be discussed by way of good management. At present the waste generation in Bumi Waras reaches 166.13 meters, while the carrying capacity of waste in Bumi Waras is only 41.57%. Proving that a lot of the untransported waste ends up in Bandar Lampung Beach. The purpose of this study was to study the policy alternatives that the Government carried out in handling waste in the Bumi Waras Village, Bandar Lampung City. This type of research uses descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation and documentation. The results of this study are alternative policies for waste management through the waste bank program, the distribution of programs through socialization conducted in September until now by the Bandar Lampung City Environment Office in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) to empower communities in this location to be used for converting valuable waste into goods that have potential and selling value.

Keywords: Innovation, Waste Management, PLPBK

**INOVASI KEBIJAKAN PENATAAN LINGKUNGAN DAN
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS
(Studi Pada Masalah Sampah Di Kelurahan Bumi Waras
Kota Bandar Lampung)**

Oleh

ANISA RIZKI

(Skripsi)

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **INOVASI KEBIJAKAN PENATAAN
LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN BERBASIS
KOMUNITAS**
(Studi pada Masalah Sampah di Kelurahan Bumi
Waras Kota Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : **Anisa Rizki**

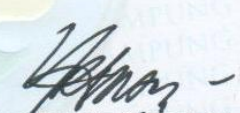
No. Pokok Mahasiswa : **1516021069**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

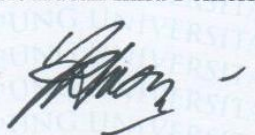
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 19640508 199303 1 004


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

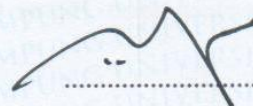
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



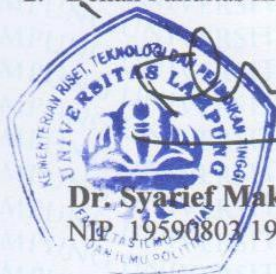
Sekretaris : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Penguji : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **20 Maret 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Maret 2019



buat Pernyataan

Anisa Rizki
NPM. 1516021069

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anisa Rizki, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Oktober 1997. Penulis merupakan putri dari Bapak Buyung Erwan dan Ibu Muliyawati anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis menempuh Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Aisyiyah III Bustanul Athfal Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003, dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 6 Gedung Air pada tahun 2009. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2012, dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yang diselesaikan di SMA Perintis 1 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada tahun 2018 di bulan Januari, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Iqro’ BismiRobbikalladzi Kholaq”

“Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang menciptakan”
(QS Al-‘Alaq [1]: 5-6)

“Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’aha”

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”
(QS Al-Baqarah 2:286)

“Jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan”
(Imam Syafi’i)

“Jangan mengalah dengan keadaan, jangan malu dengan keterbatasan”
(Anisa Rizki)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakakku yang ku sayangi sebagai tanda
bakti, hormat dan cintaku. Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah
kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Inovasi Kebijakan Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Masalah Sampah di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, saran, semangat, motivasi, dan kelancaran terciptanya skripsi ini. Semoga jiwa muda akan selalu tertanam dalam diri bapak dan segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas ilmu, saran, semangat, motivasi, dan kelancaran terciptanya skripsi ini. Semoga kesehatan dan segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
3. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku pembimbing pertama untuk penulis. Terima kasih ilmu, saran, semangat dan motivasi guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa kesabaran yang tinggi terhadap penulis yang bapak berikan. Semoga jiwa muda akan selalu tertanam dalam diri bapak dan segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP selaku dosen penguji yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Bapak Dr. Suwondo, MA selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

6. Keluargaku tercinta, mamahku, bapakku, dan kakakku. Terima kasih mamah telah mengandungku, melahirkanku, mengasuhku selama 21 tahun lamanya, semoga mamah sehat selalu sampai melihat adek menjadi orang sukses dan bisa bahagiain mamah. Terima kasih bapak, telah hadir dalam hidupku, membiayai semua keperluanku, mengantarku riset seharian dari dinas sampai ke permukiman pantai, terima kasih banyak pak. Semoga adek bisa membahagiakan bapak dan mamah kelak. Terima kasih kepada kakakku yang sudah menghiburku pada saat rasa bosan melanda, memberikanku uang untuk jajan, terima kasih kakak. Terima kasih keluargaku Semoga Allah mempertemukan kita di *Jannah*-Nya kelak. Aamiin..
7. Sahabatku, saudaraku sedari bangku sekolah menengah atas, Uci Mayasari dan Adinda Aryansi. Terima kasih sudah menemani penulis dari SMA hingga saat ini. Semoga pertemanan ini terus berlanjut sampai kita tua nanti.
8. Sahabatku di Universitas Lampung Ayuni Zalita Pepi S.IP, Rachmiati Sari S.IP, Zenia Fidia Wati S.IP. Terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, sekaligus saudara bagi penulis dari mulai semester satu sampai sekarang. Setelah kurang lebih 3 tahun kita jalani bersama, semoga pertemanan ini masih terus berlanjut meskipun kita telah berpisah nanti. Semoga kita sukses bareng ya guys.
9. Teman teman jurusan Ilmu Pemerintahan 2015. Dewi Aria S.IP, Annisa Putri S.IP, Anmeysa Yola S.IP, Diah Wilantika S.IP, Tita Maulidya S.IP, M Fajar S.IP, Untsa Sholihah S.IP, Amelisa Nurzahara S.IP, Ni Kadek Poniasih S.IP, Desi Wulandari S.IP, Linda Margreta S.IP, Annisa Erlitsya

S.IP, Aprilia S.IP, Widia Lukita S.IP, Sri Mulyaningsih S.IP, Destriana H S.IP, Lisdaria S.IP, Ifa Nurul S.IP, Merita Andriani S.IP, Nurul Era S.IP, Hairunisa S.IP, Robi Ulzikri S.IP, M Aviv S.IP, Elania Sukma S.IP, Faradhiba Fasha S.IP, Dara Atika S.IP, Intan Sartika S.IP, Ikhsan Ridho S.IP, Diska Aryanti S.IP, Oktadila Anwari S.IP, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi teman sekelas penulis selama menimba ilmu di jurusan Ilmu Pemerintahan.

10. Keluarga 40 hari KKN Desa Tunggul Pawenang. Bima Sandra (mpu), Tasya Khalis Ilmiani S.Ked, Pandu Kuncoro Aji, Roikatul Jannah, Yoppy Merkury (yopak), Wima N terima kasih telah memberikan pengalaman, pelajaran dan kenangan yang tidak pernah penulis lupakan. Walaupun hanya 40 hari tapi kekeluargaan dan kenangan itu tertanam selamanya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kalian semua.

Bandar Lampung, 20 Maret 2019

Anisa Rizki

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Kebijakan Publik.....	18
1. Kebijakan Publik	18
2. Tujuan Kebijakan Publik	19
3. Ciri-ciri Kebijakan Publik	20
4. Tahap-tahap Kebijakan Publik	21
B. Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	23
1. Tata Ruang.....	23
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang	25
3. Pemanfaatan Ruang	27
C. Tinjauan Perumahan dan Permukiman	28
1. Definisi Perumahan	28
2. Aspek Perencanaan Perumahan	29
3. Pengertian Permukiman	30
4. Elemen Permukiman	30
D. Tinjauan Inovasi	31
1. Pengertian Inovasi	31
2. Karakteristik Inovasi	32
3. Teori Difusi Inovasi.....	33
E. Tinjauan Tentang Penataan Lingkungan dan Permukiman Berdasarkan Komunitas (PLPBK)	34
1. Program PLPBK.....	34
2. Prinsip-Prinsip PLPBK.....	35
F. Tinjauan Sampah.....	37
1. Definisi Sampah	37
2. Asal Sampah	38

3. Jenis-jenis Sampah	39
G. Konsep Kemitraan	40
1. Pengertian Kemitraan	41
2. Tujuan Kemitraan	41
3. Prinsip Kemitraan	43
H. Tinjauan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	44
1. Lembaga Swadaya Masyarakat	44
2. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat	45
3. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat	46
I. Pemberdayaan Masyarakat	48
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	48
2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat	50
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	51
4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	52
J. Kerangka Pikir	55
III. METODE PENELITIAN	56
A. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Fokus Penelitian	56
D. Jenis Data	58
E. Penentuan Informan	59
F. Teknik Pengumpulan Data	61
G. Teknik Pengelolaan Data	63
H. Teknik Analisis Data	63
I. Teknik Validasi Data	64
IV. GAMBARAN UMUM	66
A. Sejarah Umum Kelurahan Bumi Waras	67
B. Keadaan Umum Wilayah Kelurahan Bumi Waras	67
C. Keadaan Penduduk Kelurahan Bumi Waras	68
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Hasil Penelitian	72
1. Inovasi	73
2. Saluran Komunikasi	78
3. Jangka Waktu	86
4. Sistem Sosial	92
B. Pembahasan Inovasi Kebijakan PLPBK	109
1. Inovasi	109
2. Saluran Komunikasi	112
3. Jangka Waktu	116
4. Sistem Sosial	119
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Penduduk Miskin di Provinsi Lampung 2017	2
Tabel 2. Surat Keputusan Walikota Penetapan Kawasan Kumuh	4
Tabel 3. Data Timbulan Sampah Tahun 2017	8
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 5. Data Informan	60
Tabel 6. Jumlah Penduduk Bumi Waras	68
Tabel 7. Agama yang dianut	69
Tabel 8. Jumlah Penduduk dari Golongan Umur	69
Tabel 9. Jumlah Penduduk dari Mata Pencaharian	70
Tabel 10. Jumlah Sarana dan Prasarana	71
Tabel 11. Sarana dan Prasarana Kebersihan	71
Tabel 12. Triangulasi Data	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	55

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota merupakan tempat bermukimnya masyarakat yang tinggal di perkotaan yang merupakan pusat dari tempat kegiatan dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Perkembangan kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan pusat kota yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat dan membawa pengaruh bagi tenaga kerja baik dalam kota maupun dari luar kota. Sehingga memicu terjadinya kepadatan penduduk yang menjadi dampak bagi kelangsungan hidup masyarakat di perkotaan.

Kepadatan penduduk menimbulkan permasalahan, seperti pemukiman kumuh merupakan permasalahan yang sejak lama berkembang di perkotaan. Pemukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan bagi pengembangan kota tak terkecuali di Kota Bandar Lampung. Pemukiman kumuh merupakan pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Salah satu penyebab pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung adalah faktor kemiskinan. Karena tidak tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan

menuntut masyarakat yang miskin tersebut membangun pemukiman di lahan yang sempit dan bangunan yang mereka dirikan tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Miskin di Provinsi Lampung 2017

Wilayah	Jumlah (Ribu)
Lampung Barat	42.71
Tanggamus	77.53
Lampung Selatan	150.11
Lampung Timur	167.64
Lampung Tengah	162.38
Lampung Utara	131.78
Way Kanan	62.00
Tulang Bawang	44.31
Pesawaran	71.64
Pringsewu	44.41
Mesuji	15.16
Tulang Bawang Barat	21.77
Pesisir Barat	23.76
Bandar Lampung	100.50
Metro	16.06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2017

Pada data tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak. Hal ini terjadi karena seiring dengan harga rumah yang semakin mahal akibat ketersediaan lahan yang kian terbatas, sementara jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya sehingga timbulnya pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung.

Jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung, dari hasil sensus BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2018 memiliki populasi penduduk sebanyak 1.251.642 jiwa. Hal ini meningkat dari tahun 2017 sebanyak 997.728 jiwa dengan luas wilayah sekitar 197,22 km² maka Kota Bandar Lampung memiliki kepadatan

penduduk 6.346 jiwa/km². Pada berita *online*, data dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa:

“Sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga tinggal di dalam kondisi yang rumah yang tidak layak huni dan terdapat 35.291 ha kawasan kumuh perkotaan yang tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Populasi penduduk perkotaan di Indonesia meningkat dari 7400 orang per km² menjadi 9400 orang per km² dan diperkirakan 68% orang akan tinggal di Kota pada tahun 2025, sehingga kawasan kumuh terus meningkat” (sumber: www.poetramerdeka.com di akses pada tanggal 29 November 2018 pukul 13:39 WIB)

Berita *online* di atas, menunjukkan bahwa harus ada tindakan atau kebijakan untuk mengentaskan pemukiman kumuh yang selama ini berkembang di perkotaan. Pada tahun 2014 Dirjen Cipta Karya meluncurkan program yaitu Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) program tersebut didukung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan dalam program tersebut terdapat 26 kelurahan yang masuk kedalam kategori kawasan kumuh.

Program PLPBK mempunyai 7 (tujuh) indikator kekumuhan yaitu, keteraturan bangunan, akses jalan lingkungan, penyediaan akses air bersih, penyediaan akses sanitasi, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau. Program dapat dikatakan berhasil jika indikator tersebut telah terlaksanakan dan mencapai target 100-0-100. Maksud dari target tersebut ialah memenuhi 100% kebutuhan dasar air minum bagi warga miskin, dan 0% menghilangkan pemukiman kumuh, serta 100% menyelesaikan permasalahan sanitasi lingkungan.

Setelah penjelasan program di atas, kemudian Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang kumuh sebagai berikut:

Tabel 2. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.974/IV.32/HK/2014 Tentang Penetapan Wilayah Kumuh di Bandar Lampung

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif	
			Kelurahan	Kecamatan
1.	Kota Karang Raya	16,60	Kota Karang Raya	Teluk Betung Timur
2.	Kota Karang	20,00	Kota Karang	Teluk Betung Timur
3.	Gedung Pakuon	6,58	Gedung Pakuon	Teluk Betung Selatan
4.	Negeri Olok Gading	6,00	Negeri Olok Gading	Teluk Betung Selatan
5.	Talang	9,42	Talang	Teluk Betung Selatan
6.	Kangkung	21,03	Kangkung	Bumi Waras
7.	Bumi Waras	14,46	Bumi Waras	Bumi Waras
8.	Suka Raja	42,50	Suka Raja	Bumi Waras
9.	Bumi Raya	8,64	Bumi Raya	Bumi Waras
10.	Ketapang	2,00	Ketapang	Panjang
11.	Way Lunik	0,66	Way Lunik	Panjang
12.	Pidada	6,63	Pidada	Panjang
13.	Panjang Utara	0,69	Panjang Utara	Panjang
14.	Karang Maritim	2,00	Karang Maritim	Panjang
15.	Serengsem	1,50	Serengsem	Panjang
16.	Sukajaya Baru	12,51	Sukajaya Baru	Tanjung Karang Barat
17.	Palapa	7,49	Palapa	Tanjung Karang Pusat
18.	Pasar Gintung	11,18	Pasar Gintung	Tanjung Karang Pusat
19.	Kaliawi Persada	3,18	Kaliawi Persada	Tanjung Karang Pusat
20.	Kebon Jeruk	20,08	Kebon Jeruk	Tanjung Karang Timur
21.	Sawah Lama	10,78	Sawah Lama	Tanjung Karang Timur
22.	Sawah Brebes	7,12	Sawah Brebes	Tanjung Karang Timur
23.	Sukamenanti Baru	31,51	Sukamenanti Baru	Kedaton
24.	Gunung Sulah	19,10	Gunung Sulah	Way Halim
25.	Campang Raya	5,06	Campang Raya	Sukabumi
26.	Tanjung Agung Raya	4,49	Tanjung Agung Raya	Kedamaian

Sumber: Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung N0 974/ IV.32/HK/2014

Pada tabel 2. dapat dilihat 26 kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung. Kecamatan Teluk Betung Timur dengan luas 36,60 Ha, Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan luas 22,00 Ha, Kecamatan Bumi Waras dengan luas 86,63 Ha, Kecamatan Panjang dengan luas 13,48 Ha, Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan luas 12,51 Ha, Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan luas 21,85 Ha,

Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan luas 37,98 Ha, Kecamatan Kedaton dengan luas 31,51 Ha, Kecamatan Way Halim dengan luas 19,10 Ha, Kecamatan Sukabumi dengan luas 5,06 Ha dan Kecamatan Kedamaian dengan luas 4,49 Ha.

Kelurahan Bumi Waras merupakan kelurahan yang menerima program tersebut. Program PLPBK di Kelurahan Bumi Waras sudah berjalan namun terdapat hambatan yang belum dapat teratasi yaitu salah satunya permasalahan sampah di permukiman pesisir pantai dan di permukiman pinggir sungai. Dalam hal ini, perlu adanya penanganan yang komprehensif agar masalah tersebut teratasi.

Masalah sampah menurut Dwiyanto (2011:240) merupakan salah satu masalah serius dalam lingkungan hidup diseluruh dunia dan kaitannya sangat erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Semua orang tidak bisa terlepas dengan masalah sampah, sebagai pihak yang menghasilkan sampah. Maka dapat dikatakan persoalan sampah adalah masalah persepsi masyarakat mengenai sampah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan adanya kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya menindaklanjuti amanat Undang-undang tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di perkotaan dilaksanakan dengan menggunakan TPA Regional dan mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Marliani (2014:125) meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. Sedangkan Lestari (2014:571) mengatakan bahwa, paradigma lama pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*) yaitu hanya sebatas kumpul, angkut dan buang yang berakhir di TPA. Cara pengelolaan sampah dengan pendekatan lama menimbulkan banyak masalah salah satunya pencemaran air. Paradigma pengelolaan sampah dengan pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah terpadu.

Timbulnya sampah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, jumlah penduduk yang terus meningkat, sarana dan prasarana yang kurang memadai di permukiman kumuh, dan kurang tegasnya penerapan sanksi sehingga tidak membuat pelanggar jera. Jika masalah sampah ini tidak segera ditangani maka akan berdampak bagi kehidupan manusia.

Kota Bandar Lampung memiliki luas mencapai 197,22 km² sedangkan populasinya mencapai 1.251.642 jiwa. Produksi sampah harian di Bandar Lampung terus meningkat, perkantoran dan pusat perbelanjaan menyumbang 63% sampah, pemukiman menyumbang 16,67% dan pasar tradisional menyumbang 20,34%. Peningkatan sumbangan sampah tersebut tidak diimbangi dengan

penambahan lahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hingga kini kota Bandar Lampung hanya mengandalkan TPA Bakung sebagai TPA terbesar. Sampah yang tidak terserap TPA Bakung tersebut akhirnya banyak yang berakhir di pesisir Teluk Lampung.

Sampah yang menumpuk di pesisir Bandar Lampung dipengaruhi oleh delapan sungai. Sungai yang bermuara ke Teluk Lampung yaitu sungai Keteguhan, Kuripan Hilir, Sukamaju Hilir, Kunyit, Kupang Hilir, Way Lunik Hilir, Way Galih Hilir dan Way Kuala Hilir. Penumpukan sampah tersebut terjadi karena, badan sungai dari hulu belum terjaga dengan baik sehingga sampah terbawa aliran sungai ke laut lalu menumpuk di pantai.

Penyebab sampah bermuara ke sungai kemudian menumpuk di pantai disebabkan oleh masyarakat yang kurang menyadari kebersihan lingkungan yaitu dengan membuang sampah sembarangan di sungai maupun di pantai. Akibat dari masyarakat yang membuang sampah di sungai dan pantai maka sampah tersebut menjadi sampah yang tidak terangkut oleh petugas, kemudian sampah tersebut akan hanyut dan meluap hingga ke pesisir pantai. Sehingga permasalahan sampah di pantai menjadi kendala atau tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasinya.

Terkait dengan jumlah timbulan sampah di Kota Bandar Lampung yang terus meningkat setiap tahunnya hal ini perlu adanya solusi atau terobosan-terobosan baru dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung supaya sampah yang tidak terangkut seperti yang berada di sungai dan

yang berada di pantai dapat berkurang. Data timbulan sampah dapat dilihat yang sebagai berikut:

Tabel 3. Data Timbulan dan Pengangkutan Sampah Pemukiman di Bandar Lampung 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan sampah (m ³)	Jumlah sampah yang terangkut (m ³)	Presentase pengangkutan sampah (%)
1	Teluk Betung Timur	87,212	149,53	71,38	51,73
2	Bumi Waras	87,359	166,13	74,97	41,57
3	Panjang	86,257	164,90	82,74	50,72
4	Teluk Betung Utara	86,074	130,19	101,10	45,84
5	Teluk Betung Selatan	87,195	157,06	77,03	42,04
6	Teluk Betung Barat	86,732	167,23	97,99	56,84
7	Tanjung Karang Pusat	83,119	162,05	94,19	66,37
8	Tanjung Karang Barat	73,278	159,70	80,26	49,71
9	Kemiling	81,345	131,36	83,96	63,23
10	Kedaton	72,167	121,67	88,27	70,16
11	Rajabasa	78,120	143,32	79,20	59,24
12	Tanjung Karang Timur	71,226	109,57	82,07	82,03
13	Sukarame	68,072	164,47	93,35	80,02
14	Sukabumi	70,112	162,61	90,50	69,05
15	Wayhalim	68,041	141,88	98,81	87,98
16	Tanjung Seneng	62,106	127,23	82,21	78,94
17	Langkapura	66,110	139,98	92,11	85,04
18	Labuhan Ratu	69,086	131,09	90,10	79,01
19	Kedamaian	67,102	120,18	85,71	76,32
20	Enggal	62,117	128,11	93,12	83,55
	Jumlah	1.076.901	2.848,24	1.605,95	69,28

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2017

Pada data di atas, dapat dilihat beberapa kecamatan telah mampu melakukan pengangkutan sampah lebih dari 50% dari timbulan sampah yang dihasilkan. Dalam hal ini, daerah yang telah mampu melakukan pengangkutan sampah setengah dari total timbulan memiliki masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan dan aparaturnya di daerah tersebut mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan daerah yang belum mampu untuk melakukan pengangkutan dengan baik diindikasikan bahwa daerah tersebut masyarakatnya masih acuh dalam menjaga lingkungan.

Sisa dari sampah yang tidak terangkut tersebut ada yang ditimbun, dibakar atau bahkan sampah yang tidak terangkut tersebut dibuang sehingga meluap di pinggir sungai dan pesisir pantai. Hal ini juga disebutkan dalam berita *online* sebagai berikut:

“Riset terbaru Sustainable Waste Indonesia (SWI) mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia yang masih tidak terkelola dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia setiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak tertangani sedangkan 7% sampah didaur ulang dan 69% sampah berakhir di TPA” (sumber: <https://m.cnnindonesia.com> di akses pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 11:20 WIB)

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sulistiyorini et al (2015:72) sampah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sampah harus diolah atau didaur ulang dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Sampah yang selama ini kita buang begitu saja, ternyata masih dapat diolah kembali antara lain dalam bentuk kerajinan yang bernilai ekonomi, bercita rasa seni dan unik. Secara umum pengelolaan sampah dilakukan dalam tiga tahap kegiatan yaitu, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah akan mengalami proses-proses tertentu, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis.

Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan potensi-potensi yang berpengaruh terhadap perubahan lingkungan oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah. Namun demikian sering kita temui sampah yang tidak berada pada tempat yang dapat menjamin keadaan aman bagi lingkungan, sehingga mempunyai dampak terhadap kesehatan lingkungan.

Sampah yang kurang diperhatikan tersebut dapat berfungsi sebagai tempat berkembangbiaknya serangga ataupun binatang pengganggu lain yang dikenal sebagai vektor penyakit, di mana vektor tersebut dapat menimbulkan berbagai menular seperti diare, kolera, tifus dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Penyakit DBD dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur kulit dapat juga menyebar, selain hal tersebut sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran.

Menurut Fitriana (2013:133) pencemaran yang diakibatkan oleh sampah yaitu pencemaran udara dan tanah yang secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Macam pencemaran udara yang ditimbulkan oleh sampah misalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun.

Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO₂), nitrogen-monoksida (NO), gas belerang, amoniak dan asap di udara. Asap di udara, asap yang ditimbulkan dari bahan plastik ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker. Seperti pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah misalnya terjadinya perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air.

Untuk mengatasi sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara, dalam satu hari armada truk melakukan penarikan sampah sebanyak 4 (empat) kali bahkan sampai lebih jika sampah di TPS sudah terlalu menumpuk akibat keterlambatan petugas SOKLI (Satuan Organisasi Kebersihan Lingkungan) yang mengangkut sampah dari rumah-rumah warga. Waktu pengangkutan sampah tersebut biasanya dilakukan pembagian waktu dari 05.00 s.d selesai, 15.30 s.d selesai, 19.30 s.d selesai, 21.30 s.d selesai.

Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung menggunakan *dump truck* dari tempat pembuangan sampah sementara kemudian diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir di Bakung. Adapun jumlah kendaraan yang dimiliki DLH berjumlah 85 unit armada pengangkut sampah yaitu, *dump truck* 30 (unit), *amroll/container truck* 15 (unit), buldozer 2 (unit), gerobak dorong 38 (unit), namun dari jumlah tersebut ada beberapa armada yang tidak dapat beroperasi karena kondisi yang usang.

Keadaan atau kondisi armada yang sudah tua dapat menyebabkan kendaraan rusak sehingga menyebabkan sampah menumpuk di TPS. Maka upaya dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini yaitu memberikan fasilitas tambahan atau menambah jumlah armada pengangkutan sampah. Guna memperlancar petugas kebersihan dalam mengangkut sampah. Hal ini diungkapkan oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung sebagai berikut:

“Pada bulan ini saya tambah 5 unit armada truk terlebih dahulu, nanti pada bulan desember yang akan datang armadanya akan saya tambah lagi 8 unit. Supaya dalam pengangkutan sampah lebih optimal, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk lagi di TPS.” (sumber: <http://teraslampung.com> di akses pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 23:01 WIB)

Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai peran besar dan penting dalam pengelolaan sampah, jika sampah hanya dibuang di TPA Bakung maka akan terjadinya penumpukan sampah sehingga harus adanya tambahan lahan di TPA Bakung. Untuk ukuran kota besar seharusnya memiliki TPA seluas kurang lebih 50 Hektar. Sementara, TPA Bakung hanya memiliki luas 14 Hektar. Dalam hal ini perlu adanya tindakan atau inovasi dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Sahriwansah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

“untuk mengatasinya, kami berencana melakukan perluasan terhadap TPA Bakung dan melakukan inovasi pengolahan sampah. perluasannya bertahap, tahun depan rencananya dua hektare. kita juga akan inovasi ke depan, tidak semua sampah kita buang ke sana. jadi nanti kita kelola, bagaimana sampah itu kita kelola habis atau daur ulang. tahun depan juga rencananya akan membeli alat alat berat seperti bulldozer, ekskavator, dan konvektor untuk mengatasi masalah sampah.” (sumber: <http://kupastuntas.co> di akses pada tanggal 6 Desember 2018 pukul 02:11 WIB)

Berdasarkan berita *online* di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki rencana dan inovasi pengolahan sampah. Hal ini selaras dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang juga memiliki rencana atau aksi dalam menangani sampah di Kota Bandar Lampung khususnya wilayah pesisir. Rencana yang akan dilakukan untuk menangani sampah pesisir tersebut ada dua, yaitu rencana yang pertama berupa pembersihan secara berkala menggunakan kapal pembersih. Rencana yang kedua, untuk pemanfaatan sampah satu diantaranya adalah bekerja sama dengan perusahaan swasta yang berkecimpung di laut dan berada di wilayah pesisir melalui program bank sampah.

Pemaparan dari Sahriwansah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tersebut bermaksud supaya sampah tidak selalu dibuang di TPA Bakung karena, mengingat kondisi lahan yang memprihatinkan. Maka, diharapkan sampah tersebut dapat diserap oleh perusahaan swasta dan dimanfaatkan melalui program bank sampah. Sehingga sampah menjadi barang yang mempunyai nilai tersendiri dan tidak selalu dibuang.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Jenis	Tahun	Judul
1.	Indira Noor Izzat	Skripsi	2017	Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
2.	Viradin, Setiana, Fauzul	Jurnal	2010	Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri
3.	Meria, Iwan, Dhisa Yunika	Jurnal	2016	Karakteristik Inovasi Kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis Bagi Ibu Rumah Tangga di Bandung
4.	Eni Setyowati	Jurnal	2015	Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Muslimah Dalam Mengelola Sampah Melalui E-Media Berwawasan Sains Teknologi
5.	Yuni Puspitawati dan Mardwi Rahdriawa	Jurnal	2012	Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2018

Penelitian Indira Noor Izzat, membahas tentang penanganan sampah di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang dilakukan, terdapat masalah terkait sosialisasi kebijakan yang belum menyentuh seluruh masyarakat;

respons masyarakat yang tidak mendukung kebijakan penanganan limbah dan proses penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian Viradin, Setiawan, dan Fauzul bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja operasional pengelolaan sampah pada unit komposter di Kota Kediri dengan menggunakan analisa kinerja unit komposter baik oprasional ataupun non-operasional, analisis tingkat partisipasi masyarakat dan analisis multidimensional scaling (MDS). Hasil penelitian dengan analisis multidimensional scaling (MDS) menghasilkan jenis pengolahan sampah yaitu komposting dan daur ulang kertas. Setelah proses analisis menghasilkan arahan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat Kota Kediri sesuai dengan jenis pengolahan sampah yang dipilih masyarakat yaitu komposing dan daur ulang kertas.

Penelitian Meria, Iwan dan Dhisa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik inovasi kebijakan kantong plastik tidak gratis yang terdiri dari keuntungan relatif, kompatibilitas, triabilitas, dan observabilitas secara keseluruhan dinilai tinggi oleh ibu-ibu rumah tangga di Kota Bandung. Sedangkan karakteristik kompleksitas dari kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis dinilai rendah karena mayoritas ibu-ibu rumah tangga menganggap bahwa kebijakan ini mudah untuk diterapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik inovasi dari Kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis dinilai sudah baik oleh ibu-ibu rumah tangga di Kota Bandung.

Penelitian Eni Setyowati, bertujuan untuk mengkaji tentang pemberdayaan pemahaman dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga muslimah di Kabupaten Tulungagung dalam mengelola sampah melalui e-media berwawasan sains teknologi. Hasil pemberdayaan menunjukkan bahwa e-media pengelolaan sampah dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat, yaitu ter jadi peningkatan pemahaman sebesar 0,5 dan peningkatan keterampilan sebesar 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa e-media dalam bentuk VCD merupakan salah satu media pendidikan kepada ibu-ibu rumah tangga dalam mengelola sampah.

Penelitian Yuni Puspitawati dan Mardwi Rahdriawan, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter sosial dan budaya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kegiatan tersebut dibandingkan dengan karakter sosial ekonomi. Partisipasi yang terjadi bersifat *bottom-up*, dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan oleh masyarakat hingga merasakan kemanfaatannya secara bersama. Proses ini dimulai dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kapasitas atas karakteristik sosial oleh pengurus RW 08 Merbabu Asih. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup di lokasi studi namun juga telah mengubah perilaku masyarakat terkait pengurangan sampah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti membahas tentang pelaksanaan program penataan lingkungan dan permukiman berbasis komunitas yang sudah berjalan namun pada pelaksanaannya terdapat hambatan. Terhambatnya program tersebut karena masih banyak sampah

di pemukiman pesisir pantai sehingga kesan kumuh dan kotor tidak hilang dari kawasan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengelola sampah di Bandar Lampung terkhusus di Kelurahan Bumi Waras. Diharapkan dengan adanya inovasi kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Bumi Waras. Perbedaan lainnya yang membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu dalam penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi dari Everret M. Rogers dengan menggunakan 4 elemen pokok yaitu, Inovasi, Saluran Komunikasi, Jangka Waktu, dan Sistem Sosial.

Suatu program tidak akan berjalan secara optimal jika tidak ada dukungan dari masyarakatnya. Terlebih jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut. Program penataan lingkungan dan permukiman di Kelurahan Bumi Waras sudah bagus, hanya saja Sumber Daya Manusianya yang kurang berpartisipasi seperti masyarakat yang tidak peduli terhadap sampah, sehingga perlu inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola sampah di Bandar Lampung khususnya di Bumi Waras. Pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Inovasi Kebijakan Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Masalah Sampah di Kelurahan Bumi Waras)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, Inovasi kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengelola sampah di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengelola sampah di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian tentang Inovasi Kebijakan. Serta dapat mengembangkan dan memperdalam khasanah ilmu pemerintahan khususnya tentang politik lingkungan yang mencakup aspek penataan lingkungan dan permukiman berbasis komunitas.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya dan referensi bagi pemerintah khususnya Kordinator Kota I PLPBK Bandar Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Suharto (2005:42) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Kebijakan publik berasal dari isu yang ada di masyarakat. Isu yang mana menjadi prioritas dipilih dan diproses oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang. Agustino (2008:7) menyatakan bahwa, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan publik merupakan Suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

Sedangkan pendapat Tachjan (2006:31) mengatakan bahwa program sebagai berikut:

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets.”

Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang berupa program, keputusan, undang-undang, usulan-usulan dan rancangan-rancangan. Pada kebijakan publik, pemerintah harus memperhatikan tujuan dari kebijakan itu karena yang dilakukan pemerintah tentu berdampak bagi semua elemen. Oleh karena itu, pemerintah harus menyesuaikan dengan masalah dan kondisi yang dihadapi.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tujuan perumusan atau pembuatan kebijakan publik yaitu:

1. Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Untuk melindungi hak-hak masyarakat
3. Untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno (2010:22-24) antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno (2007:32-34) sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Pada perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang

diambil untuk memecahkan masalah. pada tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum tercapai.

B. Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Tata Ruang

Menurut Warlan (2008:25) mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pendapat peneliti mengenai penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut. Sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota harus memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota, keselarasan aspirasi pembangunan kota, daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan, dan rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budidaya kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan ketentuan.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kota adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan daerah kota. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas berlaku untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau dan rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1) Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3) Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5) Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6) Kebersamaan dan kemitraan

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7) Perlindungan kepentingan umum

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8) Kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

3. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ketentuan umum tentang pemanfaatan ruang ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- 2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

- 3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
- 4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- 5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
- 6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

C. Tinjauan Perumahan dan Permukiman

1. Definisi Perumahan

Kehadiran lingkungan perumahan sangatlah penting dan berarti bagi sebuah lingkungan perkotaan karena bagian terbesar pembentuk struktur ruang perkotaan adalah lingkungan permukiman. Oleh karena itu, munculnya permasalahan pada suatu permukiman akan menimbulkan dampak langsung terhadap permasalahan perkotaan secara menyeluruh. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa baik buruknya sistem perkotaan dipengaruhi oleh baik buruknya lingkungan permukiman.

Secara makro, dalam melakukan pembangunan khususnya pembangunan perumahan dan permukiman seharusnya dilakukan sinkronisasi anatar dua sistem, yaitu perkotaan dan pedesaan. Hal ini harus diupayakan guna menghindari terjadinya *overload* (kelebihan beban) pada lingkungan perumahan dalam wilayah perkotaan yang dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi wilayah perkotaan maupun wilayah di belakangnya yang biasanya adalah suatu wilayah pedesaan.

Perencanaan sebuah perumahan memegang peranan yang sangat penting dalam pengendalian laju pembangunan agar berdampak positif dan berkesinambungan. Perencanaan itu harus dilakukan, dimulai dari perencanaan rumah-rumah hingga perencanaan lingkungan permukiman dan ruang perkotaan, bahkan skenario wilayahnya.

2. Aspek Perencanaan Perumahan

Untuk membuat sebuah perencanaan perumahan yang dapat menjawab tuntutan pembangunan perumahan dan permukiman maka perlu dipertimbangkan secara matang aspek-aspek perencanaannya. Keberhasilan pembangunan perumahan sebagai bagian dari program pembangunan nasional tidak terlepas dari aspek-aspek perencanaan yang harus dipenuhi.

Aspek-aspek perencanaan sepanjang pembangunannya harus diperhatikan, diharapkan baik arah maupun laju pembangunan perumahan akan sesuai dengan ketentuan. Karena perumahan dan permukiman berfungsi sebagai wadah dari kehidupan sosial yang tertib maka di dalam merencanakan

perumahan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mendasari perencanaan perumahan tersebut, yang antara lain:

- 1) Lingkungan
- 2) Daya Beli
- 3) Kelembagaan

3. Pengertian Permukiman

Permukiman merupakan suatu kesatuan wilayah di mana suatu perumahan berada, sehingga lokasi dan lingkungan perumahan tersebut sebenarnya tidak akan pernah dapat lepas dari permasalahan dan lingkup keberadaan suatu permukiman. Oleh karena itu, sebaiknya jika akan dilakukan pengembangan perumahan, terlebih dahulu harus diketahui dan diteliti keadaan dan kondisi permukiman di mana perumahan tersebut akan dibangun.

Saat ini manusia bermukim bukan sekedar sebagai berteduh, namun lebih dari itu mencakup rumah dan fasilitasnya. Menurut Sumaatmadja (1988:43) mengatakan bahwa, permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi suatu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.

4. Elemen Permukiman

Permukiman terbentuk dari kesatuan isi dan wadahnya. Kesatuan antara manusia sebagai penghuni (isi) dengan lingkungan hunian (wadah) akan

membentuk suatu komunitas yang secara bersamaan dapat membentuk suatu permukiman yang mempunyai dimensi yang sangat luas, di mana batas dari permukaan biasanya berupa batasan geografis yang ada di permukaan bumi, misalnya suatu wilayah atau benua yang terpisah karena lautan. Elemen-elemen permukiman, yaitu isi dan wadah sebenarnya terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

- 1) Alam
- 2) Manusia
- 3) Masyarakat
- 4) Bangunan atau Rumah
- 5) *Networks*

D. Tinjauan Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Inovasi merupakan suatu penemuan atau pengenalan hal-hal yang baru untuk memperbaharui atau memperbaiki suatu sistem yang sebelumnya tidak berjalan secara optimal diharapkan dengan adanya inovasi yang baru dapat memperbaiki atau memperbaharui sistem yang sebelumnya tidak berjalan secara optimal tersebut.

Menurut Suryani (2008:304) Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide-ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada suatu perubahan

yang dirasakan sebagai hal yang dianggap baru oleh masyarakat yang mengalami inovasi tersebut.

2. Karakteristik Inovasi

Karakteristik inovasi adalah sifat dari difusi inovasi, di mana karakteristik inovasi merupakan salah satu yang menentukan kecepatan suatu proses inovasi. ada 5 karakteristik inovasi menurut Rogers (1983:211), yaitu: *relative advantage* (keuntungan relatif), *compability* atau *kompabilitas* (keserasian), *complexity* atau kompleksitas (kerumitan), *triability* atau triabilitas (dapat di uji coba) dan *observability* (dapat diobservasi).

- 1) *Relative Advantage* (keuntungan relatif) adalah tingkat kelebihan suatu inovasi, apakah lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya atau dari hal-hal yang biasa dilakukan. Biasanya diukur dari segi ekonomi, prestasi sosial, kenyamanan dan kepuasan. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan oleh adopter, maka semakin cepat inovasi tersebut diadopsi.
- 2) *Compatibility* atau kompatibilitas (keserasian) adalah tingkat keserasian dari suatu inovasi, apakah dianggap konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai, pengalaman dan kebutuhan yang ada. Jika inovasi berlawanan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh adopter maka inovasi baru tersebut tidak dapat diadopsi dengan mudah oleh adopter.
- 3) *Complexity* atau kompleksitas (kerumitan) adalah tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi, seberapa sulit memahami dan

menggunakan inovasi. Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan dipahami oleh adopter, maka semakin cepat inovasi diadopsi.

- 4) *Triability* atau triabilitas (dapat diuji coba) merupakan tingkat apakah suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. Suatu inovasi dapat diuji cobakan pada keadaan sesungguhnya, inovasi pada umumnya lebih cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses adopsi, maka suatu inovasi harus mampu menunjukkan keunggulannya.
- 5) *Observability* (dapat diobservasi) adalah tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang

3. Teori Difusi Inovasi

Rogers (1983:5) mengatakan bahwa, Difusi Inovasi terdiri dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu diantara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*)

Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh sebagian orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Semuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut. Kedua padanan kata di atas, maka

difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu perilaku masyarakat yang terjadi secara terus menerus. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Inovasi
2. Saluran komunikasi
3. Jangka waktu
4. Sistem sosial

E. Tinjauan Tentang Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

1. Program Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, kemudian disingkat menjadi PLPBK, pada dasarnya adalah kelanjutan dari transformasi sosial Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Beberapa prinsip dasar yang digunakan di P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, juga menjadi prinsip dasar PLPBK (Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas).

Pada P2KP, termasuk juga dalam PLPBK (Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas), pembangunan manusia adalah fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (SEL). Intervensi kegiatan PLPBK

(Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas) difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan permukiman miskin di perkotaan lingkungan permukiman tersebut ditata kembali menjadi lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kegiatan PLPBK (Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas) terfokus pada daerah-daerah kumuh dan miskin serta lokasi-lokasi khusus, dengan maksud untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya secara lebih manusiawi, dan terus mendorong sinergi para pihak untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik khususnya dalam penataan lingkungan permukimannya. Adapun tujuan dari program PLPBK adalah mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat.

2. Prinsip-Prinsip PLPBK

Menurut buku pedoman PLPBK Dirjen Cipta Karya (2014:4) menyatakan bahwa, pada dasarnya prinsip-prinsip yang dianut PLPBK sama dengan PNPM MP. Sebagai kegiatan lanjutan, PLPBK mempunyai prinsip tambahan sebagai berikut:

1) Perencanaan Komprehensif

Penataan kawasan permukiman prioritas yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di kelurahan PLPBK diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dalam menerjemahkan pembangunan

sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis komunitas yang fokus pada pengembangan infrastruktur yang mampu mendukung terciptanya kesejahteraan warga miskin.

2) Perencanaan Ruang Kawasan

Prinsip perencanaan ruang kawasan dalam PLPBK difokuskan pada penataan kawasan permukiman yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di kelurahan sebagai titik masuk penanganan kemiskinan.

3) Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah aktif terlibat dalam kegiatan PLPBK untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi kegiatan penanganan kemiskinan di wilayahnya melalui penataan lingkungan permukiman miskin/kantong kemiskinan.

4) Kreatif

Prinsip kreatif dalam PLPBK adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkualitas.

5) Inovatif

Prinsip ini mengharuskan tiap pelaku PLPBK untuk mampu menerapkan solusi kreatif dalam pemecahan persoalan dan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada untuk penataan kawasan permukiman kearah yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya yang miskin dan terpinggirkan.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)

Prinsip ini menjadikan PLPBK sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).

F. Tinjauan Sampah

1. Definisi Sampah

Sampah merupakan barang-barang atau benda yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga sehingga tidak terpakai dan dibuang. Menurut pendapat Azwar (1990:53). Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

Sampah diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis,

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain, sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain, sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

2. Asal Sampah

Aktivitas manusia merupakan salah satu penyebab atau asal muasal sampah tersebut berada karena, setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia memicu terjadinya sampah seperti, sampah rumah tangga yang semakin banyak anggota keluarga di rumah tangga tersebut maka sampah yang berasal dari rumah tangga tersebut pun banyak. Sampah merupakan hasil kegiatan alam, dan kegiatan makhluk hidup. Asal sampah digolongkan berdasarkan sampah yang dihasilkan, diantaranya sebagai berikut:

1) Binatang

Bangkai binatang yang mati di hutan tidak menjadi persoalan. tetapi, apabila terjadi di daerah permukiman bangkai itu harus dikuburkan. jika tidak dikuburkan akan mengganggu lingkungan di sekitarnya

2) Tumbuh-tumbuhan

Daun-daun pohon yang berguguran di jalanan menjadi tugas pemerintah daerah atau dinas kebersihan kota untuk menyapu dan membersihkannya sehingga keadaan kota tetap bersih dari sampah.

3) Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga dapat berupa: (1) Sampah basah, yang berasal dari sisa-sisa makanan. (2) Sampah kering, diantaranya daun-daun, pohon, kertas, kardus dan plastik-plastik. (3) Barang-barang bekas, diantaranya kaleng, botol, pecahan gelas, karton, dan pakaian bekas.

4) Sampah pasar

Pembuangan sampah dari sampah pasar pada umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah atau dinas kebersihan kota.

5) Sampah dari kompleks industri

Industri, perusahaan, atau pabrik, mengolah bahan baku menjadi bahan baku lainnya atau menjadi bahan konsumen. Proses pengolahan itu akan menghasilkan sampah. Pada umumnya industri berdiri sendiri sehingga masalah sampah harus diselesaikan sendiri.

3. Jenis-Jenis Sampah

Sampah pada umumnya di bagi 2 jenis yaitu:

1) Sampah Organik

adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, pada umumnya sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya: sisa-sisa makanan, kertas, karton dan daun-daun.

2) Sampah Non Organik

merupakan sampah yang bahan kandungannya non organik pada umumnya sampah non organik ini sangat sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya: plastik, kaleng, kaca, dan logam-logam.

G. Konsep Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2004:129) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafsah (1999:43) menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

2. Tujuan Kemitraan

Kemitraan mempunyai fungsi dan tujuan, menurut Sumardjo (2004:47) tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kerjasama, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri

Pendapat lain, menurut Martodireso dan Widada (2001:30) kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri yaitu:

1) Tujuan dari aspek ekonomi

Pada kondisi yang ideal, tujuan utama yang ingin dicapai dalam melakukan kemitraan yaitu :

- a. Meningkatkan meningkatkan usaha masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

2) Tujuan dari aspek sosial dan budaya

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dari pengusaha besar dapat diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Selain itu berkembangnya kemitraan diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan mencegah kesenjangan sosial. Dari segi pendekatan kultural, tujuan kemitraan adalah agar mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan ke depan.

3) Tujuan dari aspek teknologi

Usaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil baik dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja dan orientasi pasar. selain itu, usaha juga bersifat pribadi atau perorangan sehingga kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan menerapkan teknologi baru cenderung rendah. dengan demikian, diharapkan dengan adanya kemitraan, pengusaha besar dapat membina dan membimbing petani untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

4) Tujuan dari aspek manajemen

Pengusaha kecil selain memiliki tingkat teknologi yang rendah juga memiliki pemahaman manajemen usaha yang rendah. Dengan

kemitraan usaha diharapkan pengusaha besar dapat membina pengusaha kecil untuk membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan organisasi usaha.

3. Prinsip Kemitraan

Terdapat 3 (tiga) prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing naggota kemitraan yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2) Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

3) Prinsip Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

H. Tinjauan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan di dalam struktur kemasyarakatan, di mana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan.

Menurut Sanit (1985:77) Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni dalam hal ini perberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mansour (1996:146) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah lembaga non Pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga dari hal tersebut lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan *check and balances*, dan juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan Pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat.

2. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat

Masing-masing lembaga swadaya masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung dengan bidang yang dijalannya. Jadi, untuk melihat apakah lembaga swadaya masyarakat tersebut sudah bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak harus dilihat lagi tujuannya dari adanya LSM tersebut. Saat ini di Indonesia ada beberapa bidang yang dinaungi oleh LSM, contohnya dapat dilihat berikut ini:

- 1) Lembaga swadaya masyarakat perlindungan anak dan perempuan, LSM ini bertujuan untuk melindungi anak dan kaum perempuan yang mengalami penganiayaan dan kekerasan serta bentuk tindakan pidana lainnya. Hal ini sangat penting karena wanita di Indonesia masih banyak terampas haknya sehingga kemungkinan mereka melaporkan ke polisi mungkin masih sedikit.
- 2) Lembaga swadaya perlindungan TKI dan TKW, hak-hak para pekerja migran memang kerap kali diabaikan oleh pemerintah oleh karena itu

saat ini bermunculan LSM yang bertujuan untuk melindungi para TKI dan TKW yang mendapatkan perlakuan tidak pantas di luar negeri terutama bagi mereka yang menjadi pekerja buruh.

- 3) Lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan alam, LSM ini bertujuan untuk mengawasi dan ikut serta dalam perlindungan lingkungan alam. Biasanya terdapat LSM masing-masing lebih khusus ranahnya seperti LSM perlindungan hutan, LSM perlindungan flora dan fauna yang terancam punah, LSM pecinta lautan dan segala yang ada di dalamnya. LSM dengan tujuan ini juga sudah kian marak perkembangannya seiring dengan rusaknya alam dan tidak adanya perhatian pemerintah secara khusus.
- 4) Lembaga swadaya masyarakat perlindungan terhadap saksi dan korban, LSM ini bertujuan untuk melindungi mereka yang menjadi korban dan para saksi pada sebuah kasus baik tindak pidana maupun perdata. hal ini dilakukan karena ada banyak korban dan saksi yang tidak melaporkan tindak kejahatan dikarenakan mereka diancam dan tidak bisa bebas dalam melapor yang menjadi penyebab tawuran antar sesama korban atau saksi.

3. Fungsi Lembaga Keswadayaan Masyarakat

Saat ini di Indonesia banyak lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama pada ranah politik. Perkembangan jumlah lembaga swadaya masyarakat ini disinyalir akan terus merangkak dengan cepat bukan hanya pada tingkat provinsi saja

namun juga pada tingkat kabupaten dan kota. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia:

- a. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah.
- b. Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri.
- c. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu juga. dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.
- d. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat.
- e. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga swadaya masyarakat.

- f. Lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadikan LSM seperti halnya mayat hidup, yang ada keberadaannya namun tidak memiliki nyawa di dalamnya.
- g. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial.
- h. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya, kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan kepada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik luar negeri.

i. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Bambang (2011:245). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya atau *empowerment* atau penguatan *strengthening* kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata

empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Isbandi (2008:84) juga mengatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan sepanjang komunitas tersebut masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan atau terjadi apabila mendapat respon dari masyarakat atau masyarakat berperan dalam program tersebut. Apabila masyarakat tersebut tidak berpartisipasi maka tidak dapat disebut sebagai pemberdayaan masyarakat.

Suharto (2005:60) menyebutkan pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
- 2) Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip, terdapat empat prinsip untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Kesenjangan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik kesetaraan gender antara laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme sebagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan atau kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Konsep ini memang tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk keberlanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu dalam mengelola kegiatannya sendiri.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hikmat (2006:83) Strategi Pemberdayaan Masyarakat memiliki 3 (tiga) strategi utama pemberdayaan dalam praktik perubahan sosial yaitu, (1) tradisional, (2) aksi langsung, dan (3) transformasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Strategi tradisional

Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas dalam menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.

2) Strategi aksi langsung

Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan.

3) Strategi transformatif

Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto (1987:63) pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yang pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non direktif.

2) Tahap pengkajian

Pada tahap ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3) Tahap perencanaan alternatif program

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif atau inovasi program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap pemformalisasi rencana aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk menentukan dan merumuskan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

5) Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan

Upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena, terkadang sesuatu yang telah direncanakan dengan baik akan berbeda saat dilapangan.

6) Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7) Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek atau program harus segera berhenti atau selesai.

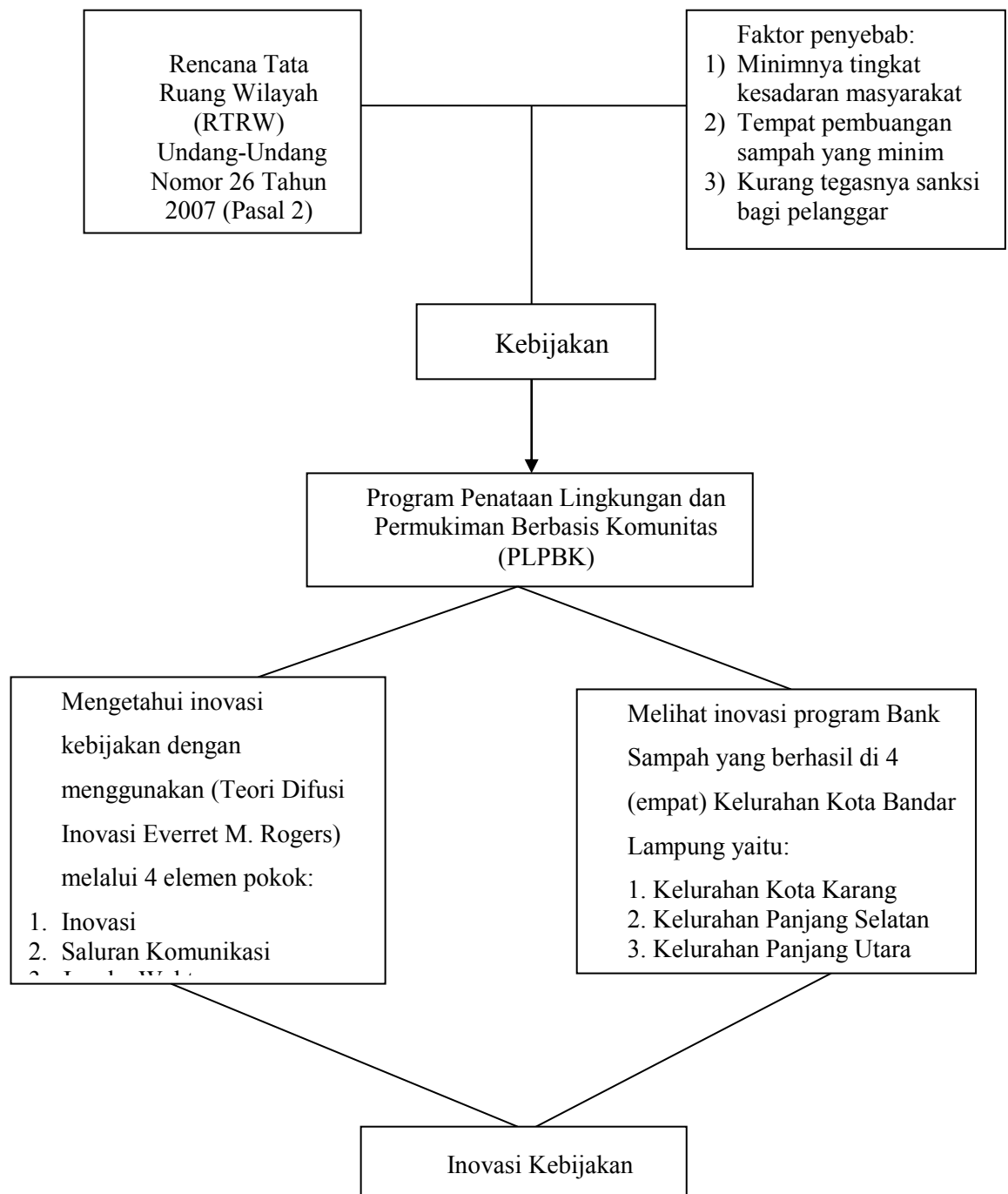
J. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah acuan para peneliti untuk membatasi atau membuat batasan-batasan dalam proses penelitiannya agar bisa memfokuskan kepada suatu masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini Pemerintah telah membuat kebijakan untuk menangani lingkungan kumuh dengan program PLPBK. Namun, kegiatan pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan Bumi Waras belum dapat dikatakan berhasil karena terdapat persoalan yang menghambat program tersebut yaitu permasalahan sampah di pemukiman pesisir pantai.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh minimnya tingkat kesadaran masyarakat dan sarana prasarana kurang memadai serta lemahnya sanksi atau kurang tegasnya sanksi untuk masyarakat yang membuang sampah tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya inovasi kebijakan dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah tersebut. Inovasi dapat diterapkan dari inovasi yang telah berhasil di kawasan lain kemudian diterapkan untuk mengelola sampah di Kelurahan Bumi Waras.

Pada difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok yaitu, inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, sistem sosial. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah difusi inovasi untuk mengelola sampah di Kelurahan Bumi Waras dengan menggunakan Teori Difusi Inovasi dari Everret M. Rogers yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pokok, yaitu:

- 1) Inovasi,
- 2) Saluran Komunikasi,
- 3) Jangka Waktu,
- 4) Sistem Sosial.



Gambar 1. Kerangka Pikir
(diolah oleh Peneliti 2018)

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci dan memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat aktual. Sehingga pada akhirnya memberikan pemahaman secara lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Sanapiah (2010:20) mengatakan bahwa, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Pada penelitian ini yang menjadi dasar penggunaan tipe penelitian deskriptif karena peneliti ingin memahami, mendeskripsikan dan mengetahui inovasi kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mengelola sampah di Kelurahan Bumi Waras.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2011:128) Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan Permukiman Kawasan Kumuh di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena data maupun informasi dan dokumentasi dapat diperoleh dari lokasi penelitian yang telah ditentukan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Menurut Idrus (2009:24) Fokus penelitian adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya penelitian kualitatif menetapkan batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui inovasi kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sampah di Kelurahan Bumi

Waras dengan menggunakan Teori Difusi Inovasi Everret M. Rogers melalui 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

- 1) Inovasi,
- 2) Saluran Komunikasi,
- 3) Jangka Waktu,
- 4) Sistem Sosial.

D. Jenis Data

Peneliti harus mendapatkan data secara langsung dan akurat sesuai dengan data yang diteliti di lapangan. Peneliti harus mencari data dari sumber utama, dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian, data primer tersebut dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari hasil wawancara dengan tatap muka antara peneliti dengan informan yang merupakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Aparatur Kelurahan Bumi Waras, LSM Mitra Bentala, UPT TPA Bakung dan masyarakat Kelurahan Bumi Waras dan informan lainnya yang dapat memberikan informasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut ialah:

- 1) Dokumen atau profil Kelurahan Bumi Waras
- 2) Data Kawasan Kumuh di Kelurahan Bumi Waras
- 3) Surat Keputusan Walikota No. 974/IV.32/HK/2014 Tentang Penetapan Wilayah yang dikategorikan kumuh
- 4) Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung 2017
- 5) Data Timbulan Sampah tahun 2017
- 6) Data sekunder lainnya, berupa jurnal penelitian dan website.

E. Penentuan Informan

Informan merupakan seorang yang ditentukan oleh peneliti untuk menjadi sumber yang memberikan informasi atau fakta terkait penelitian yang dilakukan. Sehingga data yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Informan adalah orang yang diperkirakan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Pada sebuah penelitian, penentuan informan sangat penting dilakukan agar peneliti dapat menentukan informan yang tepat untuk mendapatkan data lapangan yang akan dijadikan pendukung penelitian.

Teknik penentuan informan dalam metode kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Pada metode kualitatif memerlukan sampel yang sedikit

dan dipilih berdasarkan tujuan (*purpose*) penelitian. Informan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Data Informan

No.	Informan	Nama	Jabatan
1.	LSM Mitra Bentala	Mashabi	Ketua
2.	LKM Kelurahan Bumi Waras	Robani YS, SE	Ketua
3.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Maharani, ST, M.Kes	Kasi Pengelolaan Sampah
4.	Bappeda Kota Bandar Lampung	Fitri Yanti, ST	Kasubid Fispra
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Desyana Rusdi, ST	Staff Bidang Pengelolaan Sampah
6..	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Yovita Agustina, ST	Staff Bidang Sarana dan Prasarana Sampah
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Imron H	Petugas Kebersihan
8.	TPA Bakung	Setiawan Batin, ST, MM	Kepala UPT
9.	Aparatur Kelurahan Bumi Waras	Puspita Chaeroni, SE	Kasi Pemberdayaan
10.	Aparatur Kelurahan Bumi Waras	Henry Yanes, S.sos	Lurah
11.	Aparatur Kelurahan Bumi Waras	Istianah	Kasi Pemerintahan
12.	Masyarakat	Abdullah S	Ketua LK 1
13.	Masyarakat	Piah	Warga RT. 001
14.	Masyarakat	Mai	Warga RT. 001

Sumber: Diolah Peneliti 2018

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama menurut Fuad (2013:10) adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya atau triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan penelitian dan ingin mengetahui hal-hal dari responden. Dalam kajian-kajian kualitatif, wawancara sering berperan sewaktu seseorang berperan sebagai pengamat partisipan, meskipun orang-orang ditempat latar mungkin tidak menyadari bahwa percakapan informal mereka adalah wawancara.

Alasan peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data karena dengan melakukan wawancara peneliti dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber dan mengetahui jawaban-jawaban serta mendapatkan data yang akurat langsung dari sumbernya.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data seorang peneliti untuk langsung terjun kelapangan mengamati hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian. Tresiana (2013:87-88) mengatakan bahwa metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti

turun ke lapangan, mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

Alasan peneliti menggunakan observasi dalam pengumpulan data yaitu untuk mengamati hal-hal yang tidak peneliti dapatkan pada saat peneliti melakukan proses wawancara dengan informan. Peneliti melakukan observasi agar peneliti dapat mengamati permukiman kumuh secara langsung serta mengamati bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat selama ini di Kelurahan Bumi Waras.

3. Dokumentasi

Menurut Bogden & Biklen (1998:85) dokumen adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Dokumentasi merupakan data sekunder yang berbentuk tulisan dan bersifat tertulis, data ini sebagai data pelengkap serta penguat.

Alasan peneliti menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini yaitu sebagai alat penunjang atau penguat dalam memberikan informasi kepada pembaca yaitu berbentuk data-data seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015, Surat Keputusan Wali Kota Tahun 2004 Tentang Penetapan Kumuh, serta dokumen atau jurnal ilmiah yang mendukung dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengelolaan Data

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan atau hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang telah dihasilkan dari lapangan maka langkah selanjutnya yaitu:

- 1) Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah serta lebih rinci.
- 2) Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.
- 3) Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan induktif dan mencari pola, model, serta teori. Data-data dianalisis dimana prosesnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari *field notes* (catatan lapangan). Peneliti mengumpulkan data wawancara dengan beberapa

informan kemudian, peneliti membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2) Penyajian Data

Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. *Display* data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya. Hasil dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif dan tabel untuk memudahkan pembaca memahaminya.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses pengumpulan data mentah kemudian mengambil data yang sesuai dengan penelitian, menyajikan data berbentuk teks deskriptif dan berbentuk tabel telah dilakukan kemudian peneliti menarik kesimpulan pada penelitian ini.

I. Teknik Validasi Data

Teknik validasi adalah teknik keabsahan atau kebenaran sebuah data yang telah didapatkan peneliti. Tresiana (2013:142) mengatakan bahwa untuk menjaga tingkat kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk meminimalisir derajat kesalahan dan perlunya tindakan urgen peneliti untuk menghindari *validity threat* (validitas palsu). Maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi.

Teknik validasi dalam penelitian ini menggunakan model triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi metode menurut Patton (dalam Moleong 2014:331) memiliki dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang digunakan.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Umum Kelurahan Bumi Waras

Pada mulanya Bumi Waras adalah tempat untuk mengkarantina penderita penyakit menular seperti cacar dan kolera terutama bagi penumpang kapal laut dan kereta api yang akan melanjutkan perjalanannya ke pulau Jawa. Setelah menjalankan karantina tersebut kemudian para penderita penyakit tersebut berangsur-angsur semakin sembuh. Mengingat banyaknya penderita yang sembuh, maka masyarakat sekitar menyebutnya dengan kampung Bumi Waras, yang berarti: Bumi = Tanah, Waras = Sehat atau Sembuh, dengan kata lain: Bumi Waras berarti Tanah yang Sehat.

Kelurahan Bumi Waras pada awalnya merupakan suatu Dusun (Dusun Bumi Waras) yang menginduk pada Kampung Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara. Kemudian pada tahun 1972 diadakan pemekaran menjadi suatu kampung (Kampung Bumi Waras) yang berdiri sendiri didalam wilayah kecamatan Teluk Betung Utara Kotamadya Daerah Tk. II Tanjungkarang-Teluk Betung.

Pada tahun 1981 status Kampung Bumi Waras berubah menjadi Kelurahan Bumi Waras, kemudian pada bulan juni 1982 Kelurahan Bumi Waras secara georgrafis wilayahnya dipindahkan dari Kecamatan Teluk Betung Utara ke wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan. Selanjutnya pada tanggal 17 september 2012

berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2012 Kecamatan Teluk Betung Selatan dilakukan pemekaran menjadi Kecamatan Bumi Waras.

B. Keadaan Umum Wilayah Kelurahan Bumi Waras

1. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan Bumi Waras

Pada monografi kelurahan bumi waras, luas tanah kelurahan bumi waras adalah 72 ha, (16,24 persen dari luas total kecamatan bumi waras) dengan jumlah penduduk 13.369 jiwa dengan 3.499 Kepala Keluarga (KK). Adapun batasan wilayah kelurahan Bumi Waras:

- 1) Sebelah Utara dengan Kelurahan Bumi Raya
- 2) Sebelah Selatan dengan Teluk Lampung
- 3) Sebelah Barat dengan Kelurahan Suka Raja
- 4) Sebelah Timur dengan kelurahan Kangkung dan Kupang Raya.

Kelurahan bumi waras terdiri dari 3 lingkungan (LK) dan 45 Rukun Tetangga (RT), kelurahan bumi waras dibagi menjadi 3 lingkungan (LK) dengan rincian:

- 1) Lingkungan (LK) I Terdiri dari Kampung Kebon Dangder, Cendana dan Sekip Rahayu
- 2) Lingkungan (LK) II terdiri dari Kampung Tanjung Raman Bawah, Tanjung Raman Atas, dan Jualang
- 3) Lingkungan (LK) III terdiri dari Kampung Sriasih dan Kunyit Dalam.

2. Orbitrasi Kelurahan Bumi Waras

Jarak tempuh dari kelurahan bumi waras ke pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak Pemerintahan Kelurahan Bumi Waras dengan Kecamatan Bumi Waras Kurang Lebih 1 Km

- 2) Jarak Kelurahan Bumi Waras dengan Ibukota Bandar Lampung yaitu 3 Km
- 3) Jarak Kelurahan Bumi Waras dengan Ibukota Provinsi 3 Km.

C. Keadaan Penduduk Kelurahan Bumi Waras

1. Keadaan Umum Penduduk

Jumlah penduduk di kelurahan Bumi Waras pada tahun 2018 adalah 13.883 jiwa, yang terdiri dari 6.957 jiwa laki-laki dan 6.926 jiwa perempuan. Secara terperinci jumlah penduduk Kelurahan Bumi Waras dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk di Kelurahan Bumi Waras

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	6.957
2.	Perempuan	6.926
Jumlah		13.883

Sumber: Monografi Kelurahan Bumi Waras, 2018

Berdasarkan tabel 6. jumlah penduduk di Kelurahan Bumi Waras diatas, dapat dilihat bahwa penduduk di Kelurahan Bumi Waras di dominasi oleh penduduk Laki-laki dibanding dengan penduduk Perempuan.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kelurahan Bumi Waras terdiri dari 5 (lima) agama yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. mengenai jumlah penduduk di Kelurahan Bumi Waras berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Berdasarkan Agama yang dianut

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.877
2.	Kristen	702
3.	Katholik	366
4.	Budha	898
5.	Hindu	40
	Jumlah	13.883

Sumber: Monografi Kelurahan Bumi Waras, 2018

Pada keterangan tabel 7. menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Bumi Waras beragama Islam dengan jumlah 11.877 jiwa, yang kedua adalah Buddha sebanyak 898 jiwa, kemudian agama Kristen sebanyak 702 jiwa dan selanjutnya agama Katholik dan Hindu.

3. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Umur

Keadaan Penduduk Kelurahan Bumi Waras berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah Jiwa
1.	0 - 12 Bulan	210
2.	>1 - <5 Tahun	891
3.	>5 - <7 Tahun	632
4.	>7 - <15 Tahun	1425
5.	>15 – 56 Tahun	10219
6.	56 Tahun Keatas	610
	Jumlah	14104

Sumber: Monografi Kelurahan Bumi Waras, 2018

Pada tabel 8, dapat dilihat bahwa penduduk di kelurahan Bumi Waras didominasi oleh penduduk yang berusia >15 – 56 Tahun yang berjumlah 10219 jiwa. Sedangkan penduduk yang berusia >7 - <15 Tahun berjumlah 1425 jiwa. Kemudian penduduk yang berusia 56 Tahun Keatas berjumlah 610 jiwa.

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Penduduk Kelurahan Bumi Waras hampir sebagian besar bekerja sebagai buruh, pedagang atau wiraswasta meskipun ada pula yang bekerja sebagai PNS dan lain-lain. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah
1.	PNS	110
2.	TNI/POLRI	15
3.	DAGANG/WIRASWASTA	3407
4.	BURUH	6416
5.	PENSIUNAN	70
6.	DAN LAIN-LAIN	3865
Jumlah Penduduk		13.883

Sumber: Monografi Kelurahan Bumi Waras, 2018

Pada tabel 9, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian di Kelurahan Bumi Waras sebagian besar masyarakat bermata pencapaian sebagai Buruh dengan jumlah 6416 jiwa. Sedangkan yang paling rendah jumlahnya ialah mata pencapaian sebagai TNI/POLRI yaitu sejumlah 15 jiwa.

5. Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumi Waras

Kelurahan Bumi Waras mempunyai sarana dan prasarana yaitu :

- A. Sarana peribadatan seperti masjid, gereja, pura, vihara
- B. Sarana kesehatan, seperti puskesmas pembantu, poli klinik, apotik, posyandu, dan tempat praktek dokter
- C. Sarana pendidikan, seperti taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), Taman pendidikan Al Quran (TPA), dan Pendidikan Keagamaan.

Tabel 10. Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tempat Ibadah	22
2.	Sarana Kesehatan	17
3.	Sarana Pendidikan	31
	Jumlah	70

Sumber: Profil Kelurahan Bumi Waras, 2018

Pada keterangan tabel 10, dapat dilihat bahwa kelurahan Bumi Waras mempunyai tempat ibadah yaitu jumlah masjid/musolah 21 dan jumlah vihara 1 kemudian, sarana kesehatan 17, sarana pendidikan 31. Semua sarana dan prasarana tersebut tersebar di Lingkungan I, II, dan III.

6. Sarana dan Prasarana Kebersihan

Kelurahan Bumi Waras memiliki sarana dan prasarana kebersihan dalam menunjang pengelolaan sampah. adapun jumlah sarana dan prasarana di Kelurahan Bumi Waras adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Sarana dan Prasarana Kebersihan

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	1 lokasi
2.	Gerobak Sampah	6 unit
3.	Tong Sampah	24 buah
4.	Satgas Kebersihan	3 kelompok
5.	Anggota Satgas Kebersihan	5 orang
6.	Pemulung/Tukang Rongsok	26 orang
7.	Tempat Pengelolaan Sampah	-

Sumber: Profil Kelurahan Bumi Waras, 2018

Berdasarkan Profil Kelurahan Bumi Waras Tahun 2018, Kelurahan Bumi Waras memiliki satu Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Gerobak sampah di Bumi Waras digunakan oleh satgas kebersihan di wilayah Bumi Waras untuk mengangkut sampah rumah tangga. Sementara itu, pengelolaan sampah di Bumi Waras masih dilakukan dengan swadaya masyarakat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

Program Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan program yang memfokuskan pada area-area yang kumuh dan miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memberikan akses yang luas terutama pada lingkungan yang layak huni. Namun, pada Kelurahan Bumi Waras yang menerima program tersebut masih memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala yang menghambat program tersebut adalah persoalan sampah. Sekitar 70% penyelesaian indikator kekumuhan program tersebut sudah dilaksanakan dan yang masih diupayakan adalah pengelolaan sampahnya.

Pengelolaan sampah di Kelurahan Bumi Waras belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Karena Kelurahan Bumi Waras belum mampu melakukan pengangkutan sampah dan persentase pengangkutan sampahnya di bawah 50% dari timbulan sampah yang dihasilkan. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak dan melakukan inovasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengelola sampah di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yaitu dengan menggunakan Teori Difusi Inovasi oleh Rogers dengan melihat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Inovasi, mengenai persoalan sampah di Bandar Lampung khususnya di Kelurahan Bumi Waras yang terus berlanjut sehingga menimbulkan kesan kotor pada Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, pemerintah memiliki inovasi kebijakan dalam pengelolaan sampahnya yaitu memberdayakan masyarakat dengan program Bank Sampah yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan sejumlah pihak swasta.
2. Saluran Komunikasi, yang masih menjadi kendala bagi pemerintah yaitu tingkat kesadaran dari masyarakatnya. Oleh karena itu, inovasi kebijakan dalam menyikapi permasalahan ini produsen yang sebagai penghasil sampah yaitu masyarakat itu sendiri harus memahami cara pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan tata cara pemilahan sampah. Sehingga pada saat masyarakat membuang sampah ke TPS keadaan sampah sudah sesuai dengan jenis sampahnya. Untuk itu, inovasi kebijakan dalam mengatasi hal ini yaitu mengadakan edukasi kepada produsen sampah atau masyarakat tentang pemilahan sampah di rumah tangga.
3. Jangka Waktu, mengenai hal ini kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tentang pembuangan sampah sesuai pada waktunya masih belum dipatuhi oleh sebagian masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah diluar waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu,

inovasi kebijakan dalam mengatasi hal ini yaitu dilakukannya pengawasan dengan kamera *cctv* untuk mengawasi masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktu yang ditentukan.

4. Sistem Sosial, mengenai hal ini pemerintah telah memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan seperti di sungai, pantai, saluran drainase, lahan kosong dan sebagainya. Tetapi, peringatan tersebut seolah diabaikan oleh masyarakat sehingga sampah yang dibuang sembarangan tersebut menjadi sampah yang tidak terangkut. Oleh karena itu, inovasi kebijakan dari masalah ini yaitu bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawasi tempat-tempat yang dianggap rawan menjadi tempat pembuangan sampah secara sembarangan contohnya, di sungai, pantai, drainase, dan lahan kosong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat program bank sampah sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dan LSM Mitra Bentala harus memaksimalkan alat-alat perlengkapan, petugas bank sampah, sosialisasi tentang bank sampah supaya pada saat pelaksanaan program bank sampah berjalan secara optimal dan tidak berhenti begitu saja.
2. Terkait dengan pemberian edukasi secara rutin mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat. Sebaiknya diimbangi dengan praktik dan membagikan buku panduan pengelolaan sampah pada masyarakat.

3. Memberikan denda kepada masyarakat yang membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Supaya menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar kebijakan.
4. Sebaiknya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) pada pelaksanaannya harus disertakan dengan laporan setiap harinya. Sehingga dapat memastikan bahwa Satpol PP benar melakukan pengawasan di lokasi tersebut dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Azrul. 1990. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bambang, Riyanto. 2011. *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (ed. 4). Yogyakarta : YBPFE UGM.
- Bogden, R.C & Biklen, S.K.B. 1998. *Cualitative Research for Education to Theory and Methods*. Boston: Allyin and Bacon, inc.
- Fuad, Anis & Kandung Septo Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hafsah, Jafar Muhammad. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Ibrahim. 1988. *Inovasi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Isbandi, Rukminto A. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandar Lampung: Tresiana, Novita.
- Mansour, Fakihi. 1996. *Masyarakat sipil untuk tranformasi social pergolakan ideology LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najiati & Sri. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International
- Rogers, M. Everret. 1983. *Diffusion Of Innovations* (3rd ed.). New York: The Free Press.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta:CV.Rajawali.
- Sanapiah, Paisal. 2010. *Format Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Solichin, Abdul Wahab. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharno. 2010. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Teguh Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Sumardjo, dkk. 2004. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suryani, Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Warlan, Asep Yusuf. 2008. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).

Jurnal

Dwiyanto, M Bambang. 2011. Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12, No. 2, Hal. 240.

Fitriana, Ayu. 2013. Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Bluru Kidul Rw 11 Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Promkes*. Vol. 1, No. 2, Hal. 133.

Lestari, Soeaidy, Said. 2014. Program Inovasi Pengelolaan Sampah Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2, No. 3, Hal. 571.

Marliani, Novi. 2014. Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Organik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup. *Jurnal Formatif*. Vol. 4, No. 2, Hal. 125.

Sulistiyorini, et al. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Jurnal Share Social Work*. Vol. 5, No. 1, Hal. 72.

Puspitawati, et al. 2012. Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 8, No. 4, Hal 349-359.

Setyowati, Eni. 2015. Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Muslimah Dalam Mengelola Sampah Melalui E-Media Berwawasan Sains Teknologi. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 9, No. 1, Hal 69.

Viradin, et al. 2010. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*. Vol. 2, No. 2, Hal 95.

Undang-Undang

Peraturan Wali Kota. 2014. Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung No. 974/IV.32/HK/2014 Tentang Penetapan Wilayah Kumuh di Bandar Lampung.

Pemerintah Daerah. 2015. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Bandar Lampung.

Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Jakarta.

Internet

<https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2017/07/16/583/persentase-penduduk-miskin-provinsi-lampung-bulan-maret-2017-mencapai-13-14-persen.html>
Di akses pada tanggal 10 September 2018

<http://ciptakarya.pu.go.id/v3/search.php?q=plpbk&page=1> Di akses pada tanggal 18 September 2018

www.poetramerdeka.com Di akses pada tanggal 29 November 2018

<https://m.cnnindonesia.com> Di akses pada tanggal 1 Desember 2018

<http://teraslampung.com> Di akses pada tanggal 5 Desember 2018